PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 58 /PB/2013 TENTANG PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

## FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGGABUNGAN (*MERGE*) DATA SUPPLIER

<kop surat="">(1)</kop>
Jomor :
(6)(7)
. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2013 tentang Pengelolaan Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dengan ini kami mengajukan permintaan penggabungan data <i>supplier</i> .
a. Nomor Register Supplier: (8)   b. Nama Supplier (9)   c. NPWP (10)
Untuk digabungkan ke dalam data supplier yang benar sebagai berikut:
a. Nomor Register Supplier: (11)   b. Nama Supplier (12)   c. NPWP (13)
2. Apabila di kemudian hari terdapat konsekuensi atas data yang kami sampaikan, maka kami menyatakan siap menanggung segala akibat dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh data yang kami sampaikan.
6. Demikian atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Pejabat Pembuat Komitmen, (14)
(15) (16)

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENGGABUNGAN (MERGER) DATA SUPPLIER

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop instansi berkenaan.
(2)	Diisi dengan nomor surat.
(3)	Diisi dengan hal surat. (perubahan alamat supplier dan/atau nama pemilik rekening).
(4)	Diisi dengan jumlah lampiran berkenaan. (Lampiran berupa surat keterangan domisili supplier dan/atau fotokopi buku rekening supplier).
(5)	Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
(6)	Diisi dengan Kepala KPPN tempat satuan kerja melakukan pembayaran.
(7)	Diisi dengan alamat KPPN berkenaan.
(8)	Diisi dengan nomor register supplier yang akan digabung.
(9)	Diisi dengan nama <i>supplier</i> yang akan digabung.
(10)	Diisi dengan NPWP supplier yang akan digabung.
(11)	Diisi dengan nomor register supplier yang benar.
(12)	Diisi dengan nama supplier yang benar.
(13)	Diisi dengan NPWP supplier yang benar.
(14)	Diisi dengan tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen.
(15)	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
(16)	Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO